

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN
DESA WISATA TANJUNG PUNAK KECAMATAN RUPAT UTARA
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023**

Oleh : Yuni Amira

Pembimbing: Asiah Wasillah, S.I.P., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang *collaborative governance* untuk melihat bagaimana kolaborasi dari Pemerintah Desa Tanjung Punak beserta kelompok sadar wisata dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, UPT Pariwisata Kabupaten Bengkalis, Pertamina Hulu Rokan, serta Sekolah Tinggi Pariwisata Riau, karena Desa Tanjung Punak merupakan salah satu desa yang telah diterbitkan SK desa wisata oleh bupati Bengkalis, serta mendapat juara 1 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Provinsi Riau tahun 2023, namun pada tahun 2023 juga mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan serta sarana dan prasarana di objek wisata yang kurang terawat setelah dibangun. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi antara para aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak tahun 2023.

Metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang terkait dengan penelitian.

Penulis menggunakan teori dari Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) tentang *collaborative governance regime (CGR)* yang terdiri dari 3 komponen yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi dan dampak serta adaptasi sementara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak tahun 2023 kurang maksimal. Hal itu dibuktikan dengan peran para aktor-aktor kolaborasi belum semuanya terlaksana baik. Kolaborasi antara Desa Tanjung Punak dengan Pertamina Hulu Rokan dan Sekolah Tinggi Pariwisata yang memberikan dampak dan adaptasi sementara yang baik bagi Desa Tanjung Punak dan masyarakat desa. Sementara itu kolaborasi antara Pemerintah Desa Tanjung Punak dan Kelompok Sadar Wisata Desa Tanjung Punak yang tidak sepeham dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis dan UPT Pariwisata Kecamatan Rupert Utara terkait konflik pengelolaan potensi wisata Tanjung Lapin di Desa Tanjung Punak. Masyarakat Desa Tanjung Punak yang belum semuanya tertarik dan ikut dalam kolaborasi pengembangan desa wisata sehingga menjadikan pengembangan desa belum maksimal.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Pengembangan, Desa Wisata.

ABSTACT

This research discusses collaborative governance to see how the collaboration of the Tanjung Punak Village Government and tourism awareness groups with the Bengkalis Regency Tourism Office, Bengkalis Regency Tourism UPT, Pertamina Hulu Rokan, and Riau Tourism College, because Tanjung Punak Village is one of the villages that has been issued a tourism village decree by the Bengkalis regent, and won 1st place in the Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Riau Province in 2023, but in 2023 it also experienced a decrease in the number of tourist visits and facilities and infrastructure at tourist attractions that were less well maintained after being built. Therefore, this research aims to find out the collaboration between the actors involved in the development of Tanjung Punak Tourism Village in 2023.

The research methodology that researchers use is descriptive qualitative method with the type of data used is primary data obtained through interviews and secondary data obtained from documents related to the research.

The author uses the theory of Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) about the collaborative governance regime (CGR) which consists of 3 components, namely collaboration dynamics, collaborative actions and temporary impacts and adaptations. Based on the results of the research that has been conducted, it shows that collaborative governance in the development of Tanjung Punak Tourism Village in 2023 is not optimal. This is evidenced by the role of collaborative actors, not all of which have been well implemented. Collaboration between Tanjung Punak Village with Pertamina Hulu Rokan and the College of Tourism which provides a good temporary impact and adaptation for Tanjung Punak Village and the village community. Meanwhile, the collaboration between the Tanjung Punak Village Government and the Tanjung Punak Village Tourism Awareness Group does not agree with the Bengkalis Regency Tourism Office and the North Rupat District Tourism UPT regarding conflicts over the management of Tanjung Lapin tourism potential in Tanjung Punak Village. The Tanjung Punak Village community, not all of whom are interested and participate in the collaboration of tourism village development, making village development not optimal.

Keywords: Collaborative Governance, Development, Tourism Village.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia yang merupakan andalan dalam menghasilkan devisa secara cepat diberbagai negara. Pariwisata memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi di dunia sehingga pariwisata sering disebut sebagai passport to development, invisible export, non-polition industry, dan sebagainya . Sektor pariwisata di Indonesia juga meningkat seiring dengan berjalannya waktu, dimana pada tahun 2009-2013 pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke

indonesia sebesar 9% pertahun dan meningkat menjadi 14% pertahun pada tahun 2014-2018.

Pengembangan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun pihak swasta atau masyarakat dapat turut serta dalam pengembangan pariwisata. Hal ini menunjukkan bentuk kolaborasi dimana salah satu tujuannya adalah menjawab keterbatasan kapasitas pemerintah dalam tata kelola pemerintahan khususnya sektor pariwisata. Oleh karena itu, aktor-aktor kebijakan dalam kerjasama atau collaborative governance dapat secara

konstruktif mengisi kekurangan dan kelebihan pada proses implementasi kebijakan .

Pada masa era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif. Hal ini, termasuk kedalam urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Salah satu potensi yang bisa dikembangkan di sebuah daerah ialah bidang pariwisata, mengacu pada pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren pengembangan pariwisata termasuk kedalam pelaksanaan urusan konkuren pilihan, yang mana urusan pemerintahan konkuren pilihan diwajibkan bagi daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerah tersebut, yang mana ketentuan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Ubaidi, 2021). Pada tahun 2021 Bupati Bengkalis menetapkan 21 Desa Wisata di Kabupaten Bengkalis melalui Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 445/KPTS/VI/2021 tentang penetapan desa wisata di Kabupaten Bengkalis.

Pulau Rupat merupakan salah satu pulau yang berada di Kabupaten Bengkalis, juga merupakan salah satu pulau terluar yang memiliki luas 1.524,84 km², Pulau Rupat telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategi pariwisata Nasional di Kabupaten

Bengkalis, yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kewisataan Nasional. Kecamatan Rupat Utara merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki potensi wisata di Pulau Rupat. Kecamatan Rupat Utara memiliki 8 desa yaitu Desa Tanjung Medang, Teluk Rhu, Tanjung Punak, Puteri Sembilan, Kadur, Titi Akar, Hutan ayu dan Suka Damai, dari 8 desa yang ada di Kecamatan Rupat Utara, terdapat 5 desa yang termasuk ke dalam desa wisata yang ditetapkan oleh Bupati Bengkalis pada tahun 2021.

Desa Tanjung Punak merupakan salah 1 desa dari 8 desa di Rupat Utara yang ditetapkan sebagai desa wisata dan Desa Tanjung Punak menjadi urutan pertama di dalam SK Bupati tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 dari 4 desa wisata lainnya yang berada di Kecamatan Rupat Utara dan menjadi pusat pariwisata di Kecamatan Rupat Utara. Penetapan pemenang berdasarkan nilai dan kriteria. Ada lima kategori yakni kategori daya tarik pengunjung, kategori homestay dan toilet, kategori CHSE dan kelembagaan, dan kategori sovenis, kategori digital kreatif.

Gambar 1. Desa Tanjung Punak juara 1 anugerah Desa Wisata



Sumber : Website Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, 2023.

Dari penghargaan yang telah diraih oleh Desa Tanjung Punak

tentunya keterlibatan setiap aktor dan hubungan antar lembaga menjadi hal yang perlu dilakukan dengan baik. Sesungguhnya keterlibatan setiap aktor dan hubungan antar lembaga yang baik tersebut terdapat sebuah kolaborasi yang dijaga oleh setiap aktor dan berperan di dalamnya sehingga menarik untuk melihat bagaimana *collaborative governance* yang terjadi pada Desa Wisata Tanjung Punak. Desa Tanjung Punak merupakan desa binaan PT Pertamina Hulu Rokan , sebagai perusahaan yang memiliki visi global, PHR turut andil dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa Tanjung Punak dengan menggunakan danaCSR . Dengan menggandeng Sekolah Tinggi Pariwisata Riau sebagai mitra pelaksana, PHR berupaya mengembangkan potensi wisata berbasis masyarakat di Desa Tanjung Punak.

Desa Tanjung Punak adalah desa wisata yang menunjukkan adanya suatu bentuk *collaborative governance*. Dengan adanya hubungan pemerintah, masyarakat serta swasta. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat bergerak sebagai pelaku wisata. Sementara aktor lainnya berperan sebagai mitra yang membantu dalam mengatasi permasalahan dalam pengembangan desa wisata dan juga penggerak yang menggerakkan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, pihak ketiga disini juga berperan dalam memberikan bantuan-bantuan pembangunan fisik.

Tabel 1. Pembangunan Di Objek Wisata
Desa Tanjung Punak

No	Tahun	Pantai Tanjung Lapin	Pantai Benut Lestari
1	2021	Jogging Track, Gazebo	-
2	2022	Plang Nama, Penyambungan Jogging Track, Perigi, Parkir	Gerbang selamat datang dan Gazebo
3	2023	Kamar bilas, gudang UPT, jalan lingkar, parkir, gerbang tiket, sangkar burung, <i>homestay</i> , batu pembatas jalan	Gerei UMKM

Sumber : UPT Pengelola Pariwisata Pulau
Rupat, 2024

Berdasarkan tabel 1.5. Dilihat bahwa pada objek wisata yang ada di Desa Tanjung Punak pada setiap tahunnya melakukan pembangunan, namun yang menjadi permasalahan adalah perawatan sarana dan prasarana pada objek wisata yang tidak maksimal, dilihat dari kondisi sarana dan prasana yang tidak terawat setelah dibangun seperti wc, kamar bilas, gazebo, serta stan-stan atau ruko yang kosong. Selain itu kurangnya air bersih untuk mandi atau bilas pengunjung, ruko-

ruko kosong yang terbengkalai disekitar pantai, serta tidak adanya toko cenderamata atau pusat oleh-oleh. Padahal, jika diolah dengan baik kawasan wisata tersebut dapat menambah peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar dengan membuka tempat penginapan, rumah makan, cendramata/oleh-oleh yang merupakan hasil dari penduduk sekitar lalu dijual kepada wisatawan secara tidak langsung itu akan ikut mensejahterakan masyarakat. Hal ini

membutuhkan pelatihan atau binaan secara serius baik dari pemerintah desa atau pemerintah kabupaten maupun pihak lainnya sebagai aktor dari kolaborasi dengan memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan penghasilan masyarakat dari sektor pariwisata yang ada di desa.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan penulis di atas, maka penulis merumuskan masalah terkait proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis tahun 2023 dengan pertanyaan penelitian yaitu : bagaimanakah *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 ?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam memberikan acuan, informasi dan rangsangan pada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi instansi terkait yang mempunyai wewenang dalam hal pengembangan wisata.

D. KERANGKA TEORI

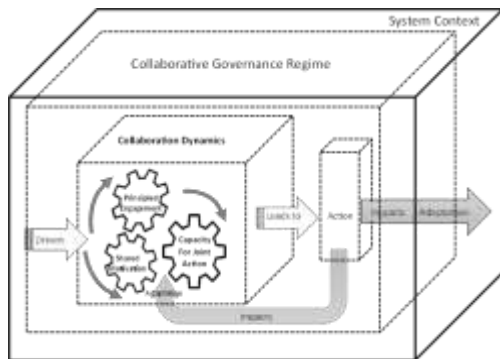
Collaborative Governance

Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Astuti, 2020).

Ansell dan Gash mengistilahkan *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash (2008) dalam (Noor, Suaedi, & Mardiyanta, 2022).

Merujuk pada definisi tersebut, dilihat bahwa *collaborative governance* diartikan sebagai sebuah proses, dimana terdapat proses interaksi antar berbagai *stakeholders* yang terlibat. Dalam hal ini, penulis memilih teori proses kolaborasi dari Emerson, Nabatchi, & Balogh yang disebut *Collaborative Governance Regime (CGR)*. *CGR* menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus dengan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak serta adaptasi sementara atas tindakan tersebut yang terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. Teori Collaborative Governance Regime (CGR) Menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012)



Sumber : *Journal an integrative framework for collaborative governance 2012*

Secara rinci , terdapat beberapa komponen penting yang menjadi proses kolaborasi seperti yang diungkapkan oleh (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012) antara lain sebagai berikut:

A. Dinamika Kolaborasi

Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaktif yang orientatif. Maksudnya adalah proses kolaborasi dilakukan secara bertahap yang terjadi dari waktu ke waktu dimulai dari pendefinisian masalah hingga implementasi kebijakan dengan berfokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi, yaitu penggeralan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama.

B. Tindakan-Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi menjadi bagian inti dari proses collaborative governance. Pada bagian ini, berbagai aktor yang terlibat akan melakukan kerja sama dengan menjalankan perannya masing-masing sesuai kerangka yang sudah dibuat. Tindakan kolaborasi penting dilakukan guna mengatasi persoalan yang terjadi.

C. Dampak serta Adaptasi Sementara

Setelah dilakukan berbagai tindakan kolaborasi, maka akan diperoleh dapat atas tindakan tersebut. Dampak yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Adaptasi di sini adalah bagaimana kolaborasi menyikap feedback dari masing-masing aktor yang terlibat, apakah masih menjadikan aktor sebagai kebutuhan dalam kolaborasi atau tidak.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif dan mencoba menggambarkan secara mendalam objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Hasil dari deskriptif kualitatif adalah informasi empiris yang faktual (Sugiyono, 2016). Metode kualitatif menurut Saryono dalam (Nurdin, 2019) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui penelitian kuantitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Tanjung Punak Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan peneliti secara langsung yang menjadi sumber utama dari penelitian. Data primer didapatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang didasari oleh sumber utama.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data tidak langsung diberikan kepada

pengumpul data, diperoleh dari pihak kedua seperti hasil penelitian orang lain, tulisan dan media cetak, berbagai buku, dokumentasi dan catatan pribadi yang memiliki hubungan dengan objek pengkaji.

4. Sumber Data

a. Informan

Sumber data penelitian dapat dilihat daftar informan pada tabel berikut :

Tabel 2. Daftar Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Dimas Asri Agustien, SKM	Jabatan Fungsional Pengembangan Destinasi Wisata (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis)
2.	Hafzan Syafii Suratman, S. STP, M.Si	Camat Rupert Utara (Kasi Tata Pemerintahan)
3.	Nora, S.Pd.I	Kepala UPT Pengelolaan Wisata Pulau Rupert
4.	Asri Ismail	Kepala Desa Tanjung Punak
5.	Sadiqin	Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Tanjung Punak
6.	Ika Fitria Hasibuan, S.Pi, M.Si	Sekolah Tinggi Pariwisata Riau
7.	1. Muhammad Sidiq 2. Nurhayati	Masyarakat (UMKM, dan masyarakat desa)

Sumber : Data Olahan Penulis, 2024

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut (Sugiono, 2018) wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan sebagai makna dalam topik tertentu.

2. Dokumentasi

Menurut (Hardani, 2020) menjelaskan bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

6. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahsan pada penelitian ini penulis menggunakan teori *Collaborative Givernance Regime (CGR)* yang terdiri dari empat Komponen yaitu Dinamika Kolaborasi, Tindakan-Tindakan Kolaborasi, dan Dampak Serta Adaptasi Sementara. Kemudian teori dielaborasi oleh penulis berdasarkan temuan-temuan di lapangan.

1. Dinamika Kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis

Dinamika Kolaborasi adalah penggerak penting pada kolaborasi. Dimana dalam melaksanakannya proses kolaborasi yang baik terdapat dinamika kolaborasi didalamnya, dan didalam dinamika kolaborasi terdapat penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama serta kapasitas untuk melakukan tindakan secara bersama.

Bagan 1. Aktor-Aktor Kolaborasi



Sumber : Data Olahan Penulis 2024

Bagan di atas menunjukkan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak pada tahun 2023. Aktor-aktor yang terlibat ini terdiri dari kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), kemudian dari bidang pemerintahan yaitu Pemerintah Desa Tanjung Punak, Pemerintah Kecamatan Rupert Utara dalam hal ini adalah UPT Pariwisata Kecamatan Rupert Utara, dan Pemerintah Kabupaten yaitu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Selain pemerintahan, juga terdapat keterlibatan dari bagian akademisi yaitu Sekolah Tinggi Pariwisata Riau serta Perusahaan energi terintegrasi Indonesia yaitu Pertamina Hulu Rokan (PHR), dan tentunya aktor penting yang juga terlibat langsung dalam kolaborasi ini adalah masyarakat Desa Tanjung Punak.

Desa Wisata Tanjung Punak telah diresmikan sebagai desa wisata pada 29 Juni 2021, peresmian Desa Tanjung Punak sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Bengkalis juga telah tertulis pada Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 445/KPTS/IV/2021 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2021 itu juga Desa Wisata Tanjung Punak menjalin kerjasama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Riau serta bantuan fasilitas penunjang dari Pertamina Hulu Rokan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, yaitu Ibu Dimas Asri Agustien, SKM selaku Jabatan Fungsional Pengembangan Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

“....awalnya mengapa Desa Tanjung Punak bisa mendapatkan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Riau dan Pertamina Hulu Rokan karena awalnya mereka adalah salah satu desa

wisata yang telah kita masukkan dan telah ter-SK desa wisata tingkat kabupaten dan telah mengikuti Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021” (Wawancara, 14 Mei 2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bagaimana Desa Tanjung Punak bisa bekerja dengan pihak Sekolah Tinggi Pariwisata Riau dan Pertamina berawal dari dikeluarkannya SK Desa Wisata oleh Bupati Bengkalis pada tahun 2021 yang mana Desa Tanjung Punak termasuk ke dalam 21 Desa yang ditetapkan sebagai Desa Wisata di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 3. Upaya Pemerintah Desa Tanjung Punak

No	Upaya
1	Membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang merupakan sebuah lembaga yang berkedudukan di tingkat desa yang dibina langsung oleh Kepala Desa
2	Mengajukan Ke Bupati Bengkalis untuk ditetapkan dan dikeluarkan Surat Keputusan sebagai Desa Wisata
3	Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Riau dan Pertamina Hulu Rokan
4	Mengikuti Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023

Sumber : Data Olahan Penulis 2024

Dengan melibatkan beberapa pihak yang di sebutkan di atas diharapkan dapat membantu pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak agar bisa lebih maju dan diminati oleh masyarakat untuk dijadikan tujuan rekreasi untuk membantu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Bagan 1. Timeline Kerja Sama



Sumber : Data Olahan Penulis 2024

2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi dalam Pengembangan Desa Tanjung Punak tahun 2023

- a. Tindakan Kolaborasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dengan Desa Tanjung Punak

Untuk tindakan kolaborasi dari Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dengan Desa Tanjung Punak dapat kita lihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Dimas Asri Agustien, SKM selaku jabatan fungsional pengembangan destinasi wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut :

“kita kebetulan ada 2 kegiatan event tahunan yang diadakan di Desa Tanjung Punak yang rutin dan tidak bisa kita hindari yaitu yang pertama adalah festival mandi shafar dan yang ke dua adalah Festival Rupert CultureParadise,itu memang tetap tak bisa kita pungkiri pasti kita libatkan mereka semuanya, terutama desanya mulai dari pemerintah desanya sampai dengan masyarakat desanya keterlibatan langsung malah. Mulai dari kita memfasilitasi mungkin dari tamu-tamu dengan adanya pembukaan homestay dari rumah masyarakat. Selain itu juga ada pelatihan dan bimbingan dari Dinas Pariwisata seperti pelatihan penataan destinasi dan lainnya.” (Wawancara pada tanggal 14 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa ada kolaborasi antara pemerintah kabupaten bengkalis dalam hal ini Dinas Pariwisata dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Tanjung Punak. Kolaborasinya dilakukan pada saat dilaksanakannya event-event tahunan yang diadakan langsung di Desa

Tanjung Punak tepatnya di destinasi wisata Pantai Tanjung lapin.

Gambar 3. Kolaborasi Dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis



Sumber : Website Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, 2023

Gambar di atas merupakan bukti adanya tindakan kolaborasi yang dilakukan antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dengan Desa Tanjung Punak, yaitu pelaksanaan event tahunan mandi shafar dan festival pantai culture paradise, yang dilaksanakan langsung di Desa Tanjung Punak dan dihadiri oleh Bupati Bengkalis.

- b. Tindakan-Tindakan Kolaborasi UPT Pariwisata Kecamatan Rupert Utara dengan Desa Tanjung Punak

Untuk tindakan kolaborasi antara UPT Pariwisata Kecamatan Rupert Utara dengan Desa Tanjung Punak dapat kita lihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nora,S.Pd.I, selaku kepala UPT Pariwisata Kecamatan Rupert Utara sebagai berikut:

“untuk kolaborasi dengan desa itu ada kita, misalnya jika mereka ada acara mereka memakai tempat di Tanjung Lapin, lokasinya dipakai, kalau mereka ada sosialisasi kita di undang, kalau kita tetap mengasi tahu desa tapi karena ini lahan Pemda kan dikelola oleh Pemda, kitakan ada memungut uang distribusi sesuai dengan perda jadi itu kita setorkan ke Pemda, jadi urusan bagi hasil atau apa itu tesaerah Pemda, kita hanya petugas di lapangan.” (Wawancara, 25 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa kita ketahui bahwa memang terdapat tindakan kolaborasi yang dilakukan oleh UPT Pariwisata dalam pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak, namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat konflik dalam pengelolaan potensi wisata di Desa Tanjung Punak yaitu pengelolaan Pantai Tanjung Lapin, sehingga UPT Pariwisata hanya melakukan tindakan-tindakan yang memang diarahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pernyataan selanjutnya juga ditambahkan oleh Ibuk Nora, S.Pd.I selaku ketua UPT Pariwisata Kecamatan Rupert Utara sebagai berikut:

“masyarakat disini kan diberikan alat-alat untuk kuliner itu, cuman hasilnya itu tidak beredar, contoh kalau hari-hari besar disini banyak orang-orang kan, itukan ni disini di Tanjung Lapin inikan kita sediakan stan-stan, silakan diisi, tapi tidak ada yang ngisi, tidak ada UMKM yang ngisi stan, jelas orang membludak disini orang mencari makan disini yang orang ngecamp tu kan orang-orang itu cari makan tapi yang ada ya cuman jualan-jualan pop mie begitudan jajanan lainnya.” (Wawancara, 25 April 2024)

Dari hasil wawancara di atas, bisa kita lihat bahwa menurut UPT Pariwisata Kecamatan Rupert Utara masyarakat pengelola UMKM yang dibina oleh Sekolah Tinggi Pariwisata itu tidak memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh UPT Pariwisata contohnya telah disediakan stan-stan untuk jualan di sepanjang Pantai Tanjung Lapin tetapi tidak diisi atau tidak digunakan oleh UMKM Desa.

c. Tindakan Kolaborasi Pertamina Hulu Rokan Dengan Desa Tanjung Punak

Untuk tindakan kolaborasi Pertamina Hulu Rokan dengan Desa

Tanjung Punak dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Ika Fitiria Hasibuan selaku Ketua LPPM Sekolah Tinggi Pariwisata Riau sebagai berikut:

“...nah pada saat dilakukan pembinaan itu kita bertanya nih kepada masyarakat pengelola UMKM yang juga di dampingi oleh POKDARWIS dan Pemerintah Desa Tanjung Punak apa yang mereka perlukan untuk meningkatkan kapasitas desa mereka, contohnya pada tahun 2023 kemarin itu mereka minta seperti freezer dan alat untuk pembuatan kerupuk nah itu disediakan dari Pertamina Hulu Rokan sebagai penyedia dana atau fasilitasnya.” (Wawancara pada tanggal 29 Mei 2024)

Jawaban lain yang mendukung pernyataan dari hasil wawancara di atas penulis dapatkan dari Bapak sadiqin selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Tanjung Punak dalam wawancara sebagai berikut:

“kita melakukan kolaborasi dengan Pertamina Hulu Rokan itu karena Pertamina Hulu Rokan merupakan mitra dari Sekolah Tinggi Pariwisata, dimana tentu pada saat dilakukan pembinaan dan pelatihan yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Riau akan membutuhkan alat yang mana alat itu disediakan oleh Pertamina Hulu Rokan itulah, jadi mereka ini perannya sebagai penyedia fasilitas.” (Wawancara, 28 April 2024)

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa tindakan kolaborasi yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Rokan dengan Desa Tanjung Punak itu berupa Penyediaan Fasilitas maupun pendanaan, dimana itu juga membutuhkan campur tangan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Riau selaku jembatan yang menghubungkan Desa

Tanjung Punak Dengan Pertamina Hulu Rokan.

d. Tindakan Kolaborasi Sekolah Tinggi Pariwisata dan Desa Tanjung Punak

Terdapat beberapa tindakan kolaborasi yang telah dilakukan. Beberapa tindakan yang telah dilakukan dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ika Fitria Hasibuan, S.Pi, M.Si, selaku ketua LPPM Sekolah Tinggi Pariwisata Riau sebagai berikut:

“...karena kita memang utamanya itu berkolaborasi dengan Desa Tanjung Punak ya, jadi memang lebih banyak melakukan kerja sama dengan mereka. Untuk kegiatan yang kita lakukan di Desa Tanjung Punak itu yang telah berhasil ada program pendampingan dan pelatihan di antaranya yaitu Kegiatan focus group discussion (FGD), sosialisasi dan pemetaan potensi desa wisata, pelatihan dan pendampingan bidang tata kelola desa wisata, kuliner dan gastronomi, tata kelola homestay dan pemandu wisata. Kemudian untuk tahun 2023 kita ada kegiatan pelatihan dan pendampingan tentang pengembangan produk pariwisata berbasis kearifan lokal serta pelatihan dan pendampingan ekonomi kreatif dan digital marketing.” (wawancara, 29 Mei 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sadiqin selaku Ketua POKDARWIS Desa Tanjung Punak dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut :

“untuk tindakan kolaborasi, kegiatan yang mana desa bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Riau itu memang banyak pelatihan dan pembinaan, pada tahun 2022 kita dibina dibidang kuliner ya, dan di tahun 2023 kita dibina untuk bagian pemasaran hasil dari kuliner yang di tahun

2022 yang mana produk yang dihasilkan adalah nugget, baso, otak-otak ikan, kerupuk, snack ikan dan stick ikan. Selain pembinaan itu tadi, di tahun 2023 kita juga ada kegiatan bimbingan teknis dan sertifikasi kompetensi itu dilakukan pada desember 2023.” (wawancara, 28 April 2024)

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, dapat kita ketahui beberapa kegiatan sebagai bentuk dari tindakan kolaborasi antara Sekolah Tinggi Pariwisata Riau dengan Desa Tanjung Punak.

Tabel 4. Keterlibatan berbagai pihak dalam Pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak

No.	Pihak yang Terlibat	Status	Peran
1.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	Dinas yang difungsikan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pariwisata.	Berperan dalam melakukan pembinaan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan atau event-event yang diadakan di pariwisata Desa Tanjung Punak.
2.	UPT Pariwisata Kecamatan Rupat Utara	UPT Pariwisata berada di bawah dinas pariwisata Kabupaten yang menangani pariwisata di tingkat kecamatan Rupat Utara	Berperan dalam mengelola objek-objek wisata, Selain itu juga berperan dalam melakukan pembangunan fasilitas pariwisata di Pantai Tanjung Lapin.
3.	Pemerintah Desa Tanjung Punak	Pemerintah yang berkedudukan di Desa Tanjung Punak	Berperan dalam identifikasi dan pengembangan potensi Desa Tanjung Punak serta melakukan pemberdayaan masyarakat
4.	Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	Kelembagaan yang terdiri dari warga setempat yang peduli terhadap pariwisata Desa Tanjung Punak yang berkomitmen untuk meningkatkan daya tarik wisata desa.	Berperan dalam pengelolaan pariwisata desa, pengembangan wisata, pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat desa dan mengatur kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak.
5.	Pertamina Hulu Rokan (PHR)	Perusahaan yang bekerja sama dalam pengembangan desa Tanjung Punak program tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility/CSR)	Berperan dalam pengembangan desa wisata Tanjung Punak melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata.
6.	Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Riau	Lembaga pendidikan tinggi yang berfokus pada bidang pariwisata dan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan pengembangan	Berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pariwisata dan mendukung pemerintah dalam pengembangan kebijakan dan strategi

Sumber : Data Olahan Penulis 2024

3. Dampak Serta Adaptasi dalam Pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak tahun 2023

Dampak yang dirasakan Desa dari kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak tahun 2023 dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sadiqin selaku Ketua POKDARWIS Desa Tanjung Punak sebagai berikut :

“... Selain itu dampak lain yang memang terlihat adalah Desa Tanjung Punak dapat memenangkan Juara 1 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) se-Provinsi Riau pada tahun 2023, itu merupakan suatu kebanggaan bagi desa Tanjung punak..” (Wawancara, pada tanggal 28 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa dari hasil kolaborasi Desa Tanjung Punak dengan beberapa pihak yang terlibat menghasilkan dampak berupa diraihnya juara 1 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) se-Provinsi Riau pada tahun 2023 yang membawa nama Desa Tanjung Punak untuk dikenal oleh lebih banyak masyarakat luas.

Adapun beberapa dampak yang dirasakan masyarakat dari kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak tahun 2023 dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sadiqin selaku Ketua POKDARWIS Desa Tanjung Punak sebagai berikut :

“Salah satu dampak yang dihasilkan dari adanya kolaborasi dengan Sekolah Tinggi pariwisata dan Pertamina Hulu Rokan yang pertama adalah dari segi ekonomi masyarakat, dimana masyarakat mendapatkan pekerjaan baru dibidang kuliner bagi para masyarakat yang mau ikut dalam UMKM. Mereka juga mendapkan ilmu baru dari adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan

serta adanya penambahan fasilitas pelengkap di UMKM, Dan untuk adaptasi masyarakat memang awalnya sedikit lama untuk beradaptasi tapi pada akhirnya masyarakat menjadi terbiasa dengan bukti bagaimana mereka ikut dalam pelatihan itu sudah mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mana bagi mereka memang sulit diterima pada awalnya.”(Wawancara, pada tanggal 28 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat dampak yang dihasilkan dari adanya kolaborasi dari beberapa pihak yang bekerja sama. Dampak yang dihasilkan bagi Desa Tanjung Punak tidak hanya menguntungkan bagi nama Desa tetapi juga menguntungkan Masyarakat karena mendapatkan pekerjaan baru. Masyarakat Desa Tanjung Punak awalnya merupakan masyarakat yang memiliki mata pencaharian di bidang perkebunan sawit dan karet, dengan adanya kolaborasi ini membuka lapangan pekerjaan baru bagi sebagian masyarakat Desa Tanjung Punak di bidang pariwisata. Dimana, masyarakat Desa Tanjung Punak mulai ada yang membuka usaha *homestay* dan cafe serta gerai ole-ole disekitar destinasi wisata Desa Tanjung Punak.

Selain dampak terhadap desa, dampak lain juga dirasakan oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Riau yang dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ika Fitria hasibuan, S.Pi,M.Si, Selaku ketua LPPM STP Riau sebagai berikut :

“Dampak bagi Sekolah Tinggi pariwisata sendiri apalagi setelah Desa Tanjung Punak Memenangkan juara 1 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) itu, karena banyaknya artikel berita yang muncul dengan membawa nama STP Dan Juga PHR, menjadikan STP banyak dikenali oleh mereka-

mereka yang awalnya tidak tau bahwa ada STP loh ternyata, dan dari sana juga menjadi banyak desa wisata yang mengajukan untuk dibina Oleh STP.”(Wawancara, 29 Mei 2024)

Dari hasil wawancara di atas bisa kita ketahui bahwa selain desa, aktor kolaborasi lain yaitu Sekolah Tinggi Pariwisata Riau juga mendapatkan dampak dari hasil kolaborasi pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak.

Tabel 5. Dampak Kolaborasi

No.	Pihak	Dampak yang dirasakan
1.	Masyarakat Desa Tanjung Punak	Beberapa masyarakat Desa Tanjung Punak menjadi memiliki pengetahuan tentang pengelolaan pariwisata, selain itu beberapa masyarakat juga mendapatkan sumber perekonomian baru.
2.	Pemerintah Desa Tanjung Punak	Adanya penambahan fasilitas penunjang pariwisata dan Desa Tanjung Punak meraih juara 1 Anugerah Desa Wisata (ADWI) Provinsi Riau
3.	Sekolah Tinggi Pariwisata Riau	Banyak tawaran masuk dari desa untuk kerja sama dan diminta untuk melakukan pembinaan desa wisata lainnya.
4.	Kelompok Sadar Wisata Desa Tanjung Punak	dengan adanya kolaborasi para anggota POKDARWIS menjadi lebih aktif dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat dan dalam mengelola

		potensi pariwisata Desa Tanjung Punak
--	--	---------------------------------------

Dari dampak yang didapatkan dari adanya kolaborasi dalam pengembangan desa wisata Tanjung Punak, menghasilkan adaptasi sementara. Adapun adaptasi sementara dalam pengembangan Desa Tanjung Punak adalah dari adanya fasilitas yang diberikan harus digunakan dengan baik. Masyarakat sebagai pengguna dari adanya fasilitas yang diberikan harus bisa memanfaatkannya dengan baik agar bisa meningkatkan kualitas desa. Selain fasilitas, pembinaan dalam pengelolaan homestay kepada masyarakat diharapkan bisa mengalami peningkatan. Untuk homestay yang ada di Desa Tanjung Punak hingga saat ini terdapat 2 buah homestay, selain itu Desa Tanjung Punak sendiri juga memiliki 3 buah penginapan dan 1 villa, sehingga diharapkan bagi masyarakat pengelola homestay untuk bisa bersaing agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak tahun 2023 kurang maksimal. Hal itu dibuktikan dengan peran para aktor-aktor kolaborasi belum semuanya terlaksana sesuai dengan yang semestinya. Kolaborasi antara Desa Tanjung Punak dengan Sekolah Tinggi Pariwisata dan Pertamina Hulu Rokan yang memberikan dampak dan adaptasi sementara yang baik bagi Desa Tanjung Punak dan masyarakat desa. Sementara itu kolaborasi antara Pemerintah Desa Tanjung Punak dan Kelompok Sadar Wisata Desa Tanjung Punak yang tidak sepadan dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dan UPT Pariwisata Kecamatan Rupat Utara terkait konflik pengelolaan potensi wisata Tanjung Lapin di Desa Tanjung Punak. Masyarakat Desa Tanjung Punak yang

belum semuanya tertarik dan ikut dalam kolaborasi pengembangan desa wisata sehingga menjadikan pengembangan desa kurang maksimal.

H. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis melihat bahwa pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak tahun 2023 pasti terdapat kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu, penulis ingin memberikan saran kepada Pemerintah Desa Tanjung Punak terkait pengembangan Desa Wisata, yaitu:

1. Untuk pemerintah Desa Tanjung Punak, haru dapat lebih memperhatikan masyarakat dan memfokuskan pembangunan terkait pariwisata mengingat desa Tanjung Punak memiliki potensi yang menjanjikan yang mana nantinya akan dapat menguntungkan masyarakat juga membantu kemajuan Desa Tanjung Punak.
2. Untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis dan UPT Pariwisata Kecamatan Rupat Utara untuk dapat memperjelas hak kepemilikan lahan pariwisata yaitu Pantai Tanjung Lapin agar tidak terus terjadi konflik dalam pengelolaan objek pariwisata.

I. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. S. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework For Collaborative Governance. *Journal Of Public Administration Research and Theory*, 1-29. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.1098/jopart/mur011>
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: BILDUNG.
- Nurdin. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Surayaba.
- Salombe, G. P. (2023). *Collaborative Governance: Pengelolaan Desa Wisata di kelurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.
- Surya, I., Nofrima, S., Saputra, H. A., & Nurmiyati, N. (2021). *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglinggo)*. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik islam*, VI(2), 190-199.
- Syafiie, I. K. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Ubaidi, M. (2021). Koordinasi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Selatbaru di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2019. *JOM FISIP*, VIII(2), 1-20.
- Utami, A. D., Hariani, D., & Sulandari, S. (2021). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. *Journal Of Public And Management Review*, 281-298.
- Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009
Tentang Kepariwisata
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011
Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kewisataan Nasional
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2
Tahun 2021 Tentang Rencana Induk
Pembangunan kepariwisataan Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021-2035
Surat Keputusan Bupati Bengkalis
Nomor: 445/KPTS/VI/2021 tentang
penetapan desa wisata di Kabupaten
Bengkalis.